

PENGARUH REVIVALISME ISLAM IRAN TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM BIDANG NUKLIR

Poetra Achock Haekal
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Satya Negara Indonesia
Jl. Arteri Pondok Indah No. 11, Jakarta Selatan 12240
haekalhaekal46@gmail.com

Partogi J. Samosir
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Jl. Pejambon No. 6, Jakarta Pusat 10110
partogijsamosir@gmail.com

Abstrak

Revivalisme Islam Iran dalam perkembangan nuklir selalu mendapat respon dari Amerika Serikat. *Paper* ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana revivalisme Islam Iran dalam bidang nuklir dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah. Revivalisme Islam Iran dalam bidang nuklir berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terutama dalam konteks keamanan regional di Timur Tengah.

Kata kunci: revivalisme Islam, Iran, Amerika Serikat, kebijakan luar negeri, nuklir

Abstract

The Iranian Islamic revivalism in nuclear development is always getting a response from the United States. This paper aims to determine the extent of Iranian Islamic revivalism in the nuclear field may affect United States foreign policy in the Middle East. The Iranian Islamic revivalism in the nuclear field influences United States foreign policy, especially in the context of regional security in the Middle East.

Keywords: Islamic revivalism, Iran, United States, foreign policy, nuclear

Pendahuluan

Revivalisme Islam atau kebangkitan Islam merupakan suatu fenomena yang menjadi perbincangan menarik di kalangan akademisi hubungan internasional. Dalam perjalanan sejarah, umat Islam mengalami masa kejayaan dan juga masa

kemunduran. Di sisi lain, bangkitnya negara-negara yang berbasis Islam merupakan gerakan awal dari kebangkitan Islam secara internasional (Ja'far et al., 2013: 23).

Gelombang revivalisme Islam di Timur Tengah muncul pada dekade ketujuh abad ke-20 M. Sebuah

momentum bangkitnya kepercayaan umat Islam bahwa setiap abad baru akan melahirkan seorang pembaharu (*mujaddid*) keyakinan umat dan perbaikan kondisi komunitas Islam. Sejak dekade ini, gerakan-gerakan Islam berada di panggung utama, dari Malaysia sampai Senegal, dari Soviet (Rusia) sampai daerah-daerah pinggiran Eropa yang dihuni oleh para imigran.

Ekspektasi umat Islam akan adanya *Tajdid* (pembaruan, kata ini yang kemudian dijadikan jargon dalam gerakan pembaruan Islam) ini menjadi teramat besar saat mereka sedang dilanda krisis. Menurut Richard Hrair Dekmejian (1995: 3), krisis saat itu memiliki ciri-ciri yang menunjukkan betapa parahnya keadaan jika dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya.

Pertama, pervasif. Kondisi krisis itu tidak terbatas pada negara-negara tertentu, namun meresap ke seluruh dunia Islam. *Kedua*, komprehensif. Krisis itu meliputi berbagai bidang sekaligus, baik sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, psikologi, maupun spiritual. *Ketiga*, kumulatif. Krisis bersifat kumulatif, terdiri dari berbagai tumpukan krisis, seperti kegagalan pembangunan bangsa, pembangunan sosial ekonomi, dan runtuhnya kekuatan militer. *Keempat*, merebaknya

xenophobia (kebencian terhadap sesuatu yang berbau asing). Dalam pandangan masyarakat Muslim, integritas kebudayaan Islam dan jalan hidup itu telah terancam oleh kekuatan-kekuatan non-Islam, seperti sekularisme, dan modernitas yang disponsori oleh pemerintah negara-negara Muslim sendiri.

Gerakan revivalisme Islam ini mewakili berbagai corak gerakan yang ada selama ini, dari yang moderat hingga yang radikal, dari yang apolitis hingga yang politis sekalipun (Zuhdi, 2011: 172). Namun, Fakta baru tentang naiknya gerakan revivalisme Islam di negara-negara Arab tahun 2010-2015 harus dijelaskan dengan konteks historis perjalanan gerakan-gerakan Islam tahun 1960-an. Kekalahan telak negara-negara Arab dari Israel dalam perang tahun 1967 menandai “runtuhnya” ideologi nasionalisme Arab yang diagungkan masyarakat Arab pada masa itu. Peristiwa tersebut dengan *Al-Naksah* (situasi paling memalukan dan memilukan) (Burdah, 2013: 77).

Islam muncul kembali sebagai kekuatan global dalam pandangan politik Muslim pada akhir tahun 1990-an. Ruang lingkup kebangkitan Islam mencakup seluruh dunia, tidak terkecuali di Timur Tengah. Semakin banyak kelompok-kelompok oposisi di Timur

Tengah yang menjadikan Islam sebagai dasar ideologi politik mereka.

Kelompok-kelompok ini juga mulai bermunculan di bagian dunia lainnya. Hampir semua pemerintah di dunia berusaha untuk menekan kelompok-kelompok politik Islam. Akan tetapi, jika ditarik ke belakang, indikasi awal kebangkitan identitas politik Islam di Timur Tengah dapat terlihat dalam Revolusi Iran pada tahun 1979 (Sihbudi, 2007: 423).

Pada tahun 1979, sebuah Revolusi Iran yang dipimpin Ayatollah Khomeini berhasil meruntuhkan monarki Pahlevi yang dikenal dekat dengan Amerika Serikat dan mendirikan sebuah republik Islam teokratis sehingga merubah nama lengkap Iran hingga saat ini menjadi Republik Islam Iran (Esposito, 1999: 674). Hal ini tidak mengherankan mengingat kaum ulama sudah memegang peran sosial politik penting sejak akhir abad ke-19. Ulama menjadi pelaku utama dalam gerakan dan lembaga sosial di Iran (Sihbudi, 2007: 424).

Kebangkitan Republik Islam Iran dalam arena politik ditandai dengan kemenangan Revolusi Islam di Iran yang telah meruntuhkan perimbangan dominasi sistem politik pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Semangat anti-Amerika adalah ciri khas

utama Revolusi Iran di bawah panji kebangkitan Islam di kawasan Timur Tengah (Iran Indonesian Radio, 2015).

Iran sendiri tidak lagi mewacanakan bentuk negara Islam (*Khilafah*) atau Pan-Islamisme, tetapi menyatakan komitmennya untuk mendukung kesatuan negara bangsa, rakyat sebagai sumber kekuasaan, prinsip-prinsip keadilan, dan terlepas dari dominasi Barat, terutama Amerika Serikat (Burdah, 2013: 80).

Sejak saat itu, Republik Islam Iran menjadi satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah yang secara tegas menolak keberadaan Amerika Serikat dan sikap yang selalu berseberangan dengan kepentingan Amerika Serikat. Karena itu, Iran dianggap sebagai musuh utama oleh Amerika Serikat (Sihbudi, 2007: 424).

Rezim Iran sepertinya sudah dilahirkan untuk menjadi penantang dominasi dan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Betapa tidak, kelahirannya saja merupakan sebuah petaka bagi Amerika Serikat terutama di Teluk. Rezim ini lahir dengan menjatuhkan salah satu aliansi paling strategis Amerika Serikat di Iran, rezim Reza Shah Pahlevi. Sejak saat itu, hubungan Iran-Amerika Serikat selalu diwarnai dengan dinamika konfrontatif dengan menyebut Amerika

Serikat sebagai “Setan Besar” (Sihbudi, 2007: 150).

Sebelum Revolusi Iran terjadi, Iran di bawah rezim Reza Shah Pahlevi (1925-1941) memiliki hubungan sangat erat dengan Amerika Serikat. Iran memiliki perlengkapan militer paling baik di Timur Tengah karena kedekatan dan ketergantungannya dengan Amerika Serikat. Pemerintahan Reza Shah Pahlevi kemudian digantikan oleh putranya, Mohammad Reza Pahlevi (1941-1979) (Romli, 2000: 96).

Dengan dukungan dan sokongan dana dari Amerika Serikat, Iran mulai melibatkan diri dalam penelitian dan pengembangan nuklir. Amerika Serikat dan Iran menandatangani *Nuclear Cooperation Agreement* pada tahun 1957 yang mulai berlaku pada tahun 1959 (Burr, 2009: 21).

Kedekatan Iran dan Amerika Serikat waktu itu menghasilkan sebuah fasilitas nuklir yang pertama kali dibangun di *Tehran Nuclear Research Center* (TNRC) pada tahun 1967 yang bertempat di *Tehran University* dan dijalankan oleh *Atomic Energy Organization of Iran* (AEOI) yang memiliki 5 megawatt reaktor nuklir yang disuplai oleh Amerika Serikat tahun 1967.

Hingga 1 Juli 1968, Iran menandatangani Traktat Non-Proliferasi

Nuklir (NPT) dan berlaku pada 5 Maret 1970 setelah diratifikasi oleh majelis. Dalam traktat tersebut, Iran memiliki hak untuk mengembangkan penelitian, memproduksi, dan menggunakan nuklir untuk tujuan damai (Sahimi, 2003).

Pasca Revolusi Iran, hubungan Iran-Amerika Serikat semakin memburuk hampir di setiap bidang. Kelompok ulama yang kini dipimpin Ali Khamenei masih belum lupa atas tiga dosa utama yang disematkan ke Amerika Serikat. *Pertama*, kudeta Mohammad Mosaddegh pada tahun 1953 yang disponsori oleh *Central Intelligence Agency* (CIA). *Kedua*, Amerika Serikat secara eksplisit mendukung kediktatoran Pahlevi. *Ketiga*, Amerika Serikat mendukung Irak pada Perang Irak-Iran tahun 1980-an (Raharjo, 2012).

Isu terkini yang mendominasi hubungan kedua negara adalah pengembangan nuklir Iran di mana Amerika Serikat khawatir bahwa Iran akan mengembangkan senjata nuklir yang bisa mengancam stabilitas dan hegemoni Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Pembicaraan Iran dengan Amerika Serikat untuk saat ini hanya terbatas pada isu nuklir dan tidak lebih dari itu (Murphy, 2009).

Pada era kepemimpinan Ahmadinejad, Iran berhasil mempercepat pengembangan nuklir selama proses

negosiasi berlangsung yang mana memberikan banyak waktu untuk memajukan tujuan mengembangkan nuklir. Iran membangun banyak pabrik petrokimia dengan kapasitas produksi hingga 41,872 juta ton pertahun. Sejak menjabat presiden Iran selama dua periode (2005-2009 dan 2009-2013), Ahmadinejad terkenal dengan pidatonya yang berapi-api, terutama dalam menentang imperialisme Amerika Serikat. Dalam pidatonya, dia kembali menegaskan permusuhan abadi antara Negara *Mullah* itu dengan Negeri Paman Sam, terutama dalam hal energi nuklir (CNN Indonesia, 2015).

Di sisi lain, pada masa pemerintahan Barack Obama, Amerika Serikat terlihat menawarkan “bahasa” yang berbeda dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain. Obama seperti memiliki kesediaan untuk berkomunikasi dengan bahasa yang digunakan oleh lawan bicaranya dan membawa pembicaraan ke tingkat yang lebih konstruktif. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kita bisa mengharapkan munculnya babak baru dalam hubungan Amerika Serikat dengan Iran.

Setidaknya Obama menawarkan sebuah pola komunikasi yang tidak dijumpai pada beberapa pendahulunya yang gemar menempatkan diri sebagai

pusat penilaian “baik-buruk”, yang cenderung melakukan campur tangan dan mengirimkan pasukan untuk berperang. Obama ingin mengembangkan hubungan dengan Iran dengan cara yang disebut Obama saling menghormati (*mutual respect*) dan saling menguntungkan (*mutual interest*) (Laksana, 2009).

Revivalisme Islam Iran dalam Bidang Nuklir

Pada awalnya, program nuklir Iran merupakan sebuah proyek kerjasama antara Republik Islam Iran dengan Amerika Serikat. Iran telah mulai mengembangkan program nuklir pada tahun 1950, namun dengan kemajuan yang tidak begitu signifikan.

Baru pada tahun 1967 dengan bantuan Amerika Serikat, Iran membangun TNRC yang dilengkapi dengan uranium berkualitas tinggi dan peralatan yang canggih. Pada tahun 1973, Mohammad Reza Pahlevi memperkenalkan rencana yang ambisius, yaitu memasang 23.000 megawatt tenaga nuklir di Iran yang langsung dikerjakan oleh AEOI sekaligus sebagai pengawas dalam proyek nuklir (Cirincione, Wolfsthal, dan Rajkumar, 2005: 298).

Setelah monarki Pahlevi terguling, Ayatollah Khomeini dengan Revolusi Islamnya kembali mengambil

alih kekuasaan dan membentuk pemerintahan sementara yang dikepalai oleh Mehdi Bazargan sebagai perdana menteri. Setelah munculnya negara Republik Islam yang baru, hubungan Iran dengan Amerika Serikat menjadi tidak harmonis. Ditambah dengan adanya pengambilalihan Kedutaan Amerika Serikat oleh para mahasiswa yang menyebabkan pemutusan hubungan diplomatik.

Pasca revolusi, Iran terus mengembangkan teknologi nuklirnya. Dengan bantuan China, Iran juga mendirikan pusat pelatihan dan penelitian dan pertambangan bijih uranium lanjutan. Pada tahun 1992, Iran menandatangani perjanjian kerja sama dalam penggunaan energi nuklir damai dengan Rusia. Pada tahun 1995, Rusia menandatangani kesepakatan dengan Iran untuk menyelesaikan pembangunan unit pertama pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dimulai pada tahun 1998.

Pada akhir 2003, sebuah kesepakatan dicapai, yang mengizinkan IAEA (*International Atomic Energy Agency*) memeriksa fasilitas nuklir di Iran. Parlemen Iran tidak meratifikasi perjanjian tersebut, sehingga Iran sering menolak untuk mengizinkan perwakilan internasional berada di fasilitas nuklirnya.

Pada tahun 2004, situasi semakin buruk karena Pakistan mengumumkan untuk mentransfer teknologi pengayaan uranium ke Iran. Iran tetap menolak pengamat internasional untuk mengawasi beberapa fasilitas nuklirnya. Setelah itu, dengan bantuan Rusia, Inggris, dan Perancis, Iran menandatangani perjanjian di mana Iran berjanji untuk menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai.

Kemudian tahun 2005, dengan kedatangan Mahmoud Ahmadinejad ke tampuk kekuasaan di Iran, penelitian nuklir pun diintensifkan. Negara ini melanjutkan penelitian ini dari pusat penelitian di Isfahan. Iran menginformasikan pada dunia bahwa mereka melanjutkan penggunaan teknologi nuklir tersebut untuk tujuan damai di bawah NPT.

Pada tahun 2009, Iran meluncurkan satelit ke orbit ruang angkasa. Amerika Serikat dan Eropa (mencakup Rusia, Perancis, dan Inggris) sekali lagi menyatakan kekhawatiran mereka tentang teknologi nuklir Iran dan kemungkinan penggunaannya untuk keperluan militer. Sementara itu, Iran melanjutkan uji coba rudalnya dan mengumumkan pembangunan pabrik pengayaan uranium kedua. Pada bulan Agustus 2010, Iran memulai pengayaan

20% uranium di pabrik di wilayah Natanz.

Pada tanggal 1 Januari 2011, menurut *Institute for Science and International Security*, Iran memiliki 4,922 kilogram uranium *hexafluoride* rendah yang sudah diperkaya. Setelah diperkaya dengan uranium *weapon-grade*, jumlah ini mungkin cukup untuk empat hulu ledak nuklir.

Pada tahun yang sama, IAEA mengeluarkan laporan yang mengatakan bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Selanjutnya pada 2012, Ahmadinejad mengatakan bahwa mereka telah menambah sebanyak 3.000 *centrifuge* baru di fasilitas pengaya uranium Iran. Saat ini, jumlah *centrifuge* yang dimiliki Iran adalah sebanyak 9.000 buah (Artileri, 2012).

Di tahun berikutnya, terpilihnya Hassan Rouhani sebagai presiden baru Iran pada Juni 2013, membawa harapan baru bagi Iran. Rouhani dianggap lebih moderat dan terbuka terhadap pihak Barat. Rouhani melakukan beberapa tindakan yang sudah lama tidak dilakukan oleh pemimpin Iran sebelumnya, terutama sikapnya terhadap Amerika Serikat.

Rouhani menelepon Presiden Amerika Serikat, Barack Obama selama 15 menit saat berkunjung ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) demi

membicarakan hubungan politik kedua negara yang memecahkan suasana “dingin” selama 34 tahun yang menyelimuti hubungan Iran-Amerika Serikat (Rizky, 2013: 5).

Rouhani juga mendukung perundingan nuklir untuk menyelesaikan masalah yang selama ini dialami Iran. Setelah terpilih sebagai presiden, perundingan nuklir diadakan antara Iran dan P5+1 (Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Rusia, dan China plus Jerman) pada 22 November 2013 di Jenewa, Swiss. Sebelumnya, pada Mei 2012, Iran menolak proposal yang diajukan oleh P5+1, di mana Iran diminta untuk menghentikan pengayaan uraniumnya (Deutsche Welle, 2013).

Seperti yang diketahui, kaum ulama memang sudah memegang peran sosial politik penting sejak akhir abad ke-19. Ulama menjadi pelaku utama dalam gerakan dan lembaga sosial di Iran. Antara tahun 1925-1979, Iran berada di bawah kekuasaan Dinasti Pahlevi. Pada 1979, sebuah Revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini berhasil meruntuhkan monarki Pahlevi dan kemudian mendirikan sebuah republik Islam sehingga nama lengkap Iran berganti menjadi Republik Islam Iran (Sihbudi, 2007: 424).

Selama masa pemerintahan kubu neokonservatif pimpinan Mahmoud

Ahmadinejad, Iran memiliki visi dan misi merevitalisasi norma-norma Revolusi Islam 1979 dalam kebijakan-kebijakannya, baik dalam maupun luar negeri. Dalam wilayah domestik, pemerintahan neokonservatif mendasarkan kebijakan-kebijakannya pada norma-norma Islami, seperti keadilan sosial ekonomi, pemberantasan korupsi, anti-pengaruh asing, dan persamaan di depan hukum.

Dalam wilayah hubungan luar negeri, pemerintahan neokonservatif Ahmadinejad berusaha merekonstruksi prinsip-prinsip politik luar negeri seperti anti-dominasi, anti-hegemoni, dan anti-penindasan sebagaimana tercantum pada Konstitusi Iran Pasal 152 dan 154 (Iran Chambers Society).

Politik luar negeri Iran sama seperti sebagian besar negara dunia yang berdasarkan kepentingan jangka panjang dan berbagai nilai yang tidak akan berubah dengan selera dan aliran politik pemerintah yang silih berganti. Politik luar negeri Iran pada hakikatnya mengacu pada tujuan-tujuan Revolusi Islam dan para pejabat Kementerian Luar Negeri serta para duta besar dan kuasa usaha negara ini juga harus memperhatikan tujuan dan prinsip tersebut.

Prinsip dan strategi permanen Iran dalam politik luar negeri telah

ditetapkan oleh Konstitusi. Pada Pasal 3 dan 4 Konstitusi Iran disebutkan: pemerintah Republik Islam Iran harus menyusun politik luar negeri negara berdasarkan parameter Islam, komitmen persaudaraan terhadap semua umat Muslim, dan dukungan terhadap kaum papa dunia. Oleh karena itu, Iran menilai negaranya sebagai *Islamic actor* yang berperan penting di Timur Tengah. Sejak 1979, Iran menambahkan aspek agama (Islam Syi'ah) dalam doktrin politik luar negerinya (Hunter, 2008: 43-48).ⁱ

Pasca Revolusi, yang terjadi di Iran adalah implementasi konsep *Wilayat Al Faqih*. Dasar teori ini adalah asumsi bahwa Nabi memiliki tiga tugas. *Pertama*, mengajarkan agama. *Kedua*, membangun dan mengatur pemerintahan. *Ketiga*, memutuskan masalah-masalah antar-individu dalam relasi-relasi sosial. Nabi sudah melakukan tiga tugas itu. Khomeini percaya bahwa ide pemisahan agama dengan politik adalah produksi Barat, karena Barat percaya untuk meraih kemajuan mereka harus meninggalkan agama.

Dalam keyakinan Syi'ah, tugas ini dilanjutkan oleh para imam Syi'ah. Pada masa kegaiban imam Syi'ah, *Faqih* (orang yang paham terhadap syariat Islam) mengemban tugas yang sama dengan mereka karena hukum Islam

harus terus ditegakkan dan tidak ada satu pun ajaran agama yang boleh dihentikan pelaksanaannya kapan saja.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Khomeini menyerukan kemandirian dalam arti yang seluas-luasnya. Untuk memiliki kemandirian, Khomeini menjelaskan lima syarat yang harus dipenuhi: percaya kepada Allah, percaya kepada diri sendiri, sanggup menanggung atau memiliki toleransi yang besar terhadap beragam kesulitan, memiliki harapan, dan menunggu. Tentang syarat kelima, yaitu menunggu, bisa diberikan catatan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam ajaran Syi'ah, yakni menunggu kedatangan Imam Mahdi. Bagi Syi'ah, "menunggu" adalah salah satu jenis ibadah.

Dengan konsep kemandirian ini, setiap individu harus bisa mandiri, yakni memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Setiap keluarga harus mandiri. Setiap masyarakat harus mandiri. Setiap kota harus mandiri. Begitu pula bangsa juga harus mandiri. Dengan begitu, bangsa Iran telah berhasil melakukan dua hal, yaitu memanfaatkan keahlian kaum muda terdidiknya dalam menggali potensi di bidang nuklir dan menyerap kebaikan asing untuk bekerja sama dengannya (Al Walid, 2013: 140).ⁱⁱ

Wilayat Al Faqih kemudian secara teknis dilembagakan ke dalam

konstitusi dan menjadi identitas nasional Republik Islam Iran. Dalam banyak aspek, formasi identitas Iran. Sang arsitek, Imam Khomeini, menyatakan bahwa monarki adalah sistem yang tidak Islami. Ini sebenarnya adalah keyakinan orisinal Syi'ah bahwa kepemimpinan Islam pasca Nabi wafat bukan menjadi urusan manusia, tetapi hak prerogatif Tuhan untuk menunjuk manusia pilihannya. Di samping itu, menurut Khomeini, sistem monarki juga identik dengan kediktatoran dan tirani.

Sementara itu, postur antagonis Iran terhadap Barat dan Uni Soviet selama Perang Dingin merupakan *output* dari prinsip anti-dominasi, anti-hegemoni, dan anti-penjajahan yang tersurat dalam Konstitusi Bab 10 Ayat 1.

Apabila dilihat dari sejarah Iran pra-revolusi, prinsip ini menggambarkan ekspresi kekecewaan atas pengalaman pahitnya selama ratusan tahun berada di bawah hegemoni negara-negara *superpower* seperti Inggris dan Rusia pada era Dinasti Qajar, kemudian Inggris, Soviet, dan Amerika Serikat pada masa Dinasti Pahlevi. Prinsip inilah yang menjadi dasar moral Iran atas kebijakan-kebijakan anti-Amerika saat ini (Ajromand, 2009: 136).

Hubungan Luar Negeri Iran-Amerika Serikat dalam Bidang Nuklir Era Ahmadinejad

Ahmadinejad adalah presiden keenam Iran selama masa revolusi dengan memperoleh 61,91% suara dalam pemilihan presiden tahun 2005. Sebelum menjabat presiden, Ahmadinejad pernah menjadi Walikota Teheran dari tahun 2003 hingga 2005. Ahmadinejad dikenal secara luas sebagai seorang tokoh konservatif yang sangat loyal terhadap nilai-nilai Revolusi Islam Iran.

Pemikiran Ahmadinejad yang konservatif menunjukkan perbedaan dalam mengambil kebijakan politik luar negerinya dibandingkan dengan dua mantan presiden sebelumnya (Mohammad Khatami dan Akbar Hashemi Rafsanjani) yang mengedepankan konsiliasi dan berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat. Ahmadinejad memandang kebijakan luar negeri yang diambil Barat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan sehingga tidak dapat ditoleransi, kecuali Barat mau mengubah pandangannya terhadap dunia Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.

Selama masa kepresidenannya, kebijakan luar negeri Iran dikembalikan kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai seperti yang dicita-citakan dalam awal

Revolusi Islam Iran. Ahmadinejad menyatakan bahwa Revolusi Islam Iran akan tetap berjalan dan tidak akan mundur sekalipun dari tujuan revolusi Islam dan akan merespon setiap manuver politik Barat.

Selanjutnya, Ahmadinejad menyatakan bahwa Iran akan melanjutkan program nuklirnya dan tidak akan pernah membatasi dirinya dengan peraturan-peraturan yang tidak adil. Ahmadinejad menyatakan bahwa negara-negara besar tidak memiliki hak untuk memutuskan tentang program nuklir Iran. Dewan Keamanan PBB berada di bawah pengaruh anggota tetapnya, seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis, dan China, maka Iran tidak akan menerima keputusan Dewan Keamanan PBB sebelum Dewan Keamanan PBB direstrukturisasi.

Selain itu, menurut Ahmadinejad, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa berusaha mendestabilisasi keamanan Iran karena Iran tidak menerima sistem yang tidak adil dan sepihak. Oleh karena itu, selama Ahmadinejad menjadi presiden, kebijakan luar negeri Iran lebih diarahkan kepada perlawanan terhadap Amerika Serikat dan mengembangkan nuklir untuk tujuan damai serta menyatukan umat Muslim di seluruh

dunia untuk bersama-sama melawan imperialisme (Mikail, 2013: 18).

Dalam pandangan revolusioner Ahmadinejad, negara seperti Amerika Serikat mustahil dapat berperan positif bagi kemajuan bangsa Iran. Lebih lanjut, menurutnya, hubungan dengan Amerika Serikat bukanlah sesuatu yang saat ini dibutuhkan oleh bangsa dan negara Iran. Langkah unilateral Amerika Serikat memutuskan hubungan dengan Iran tidak lain ditujukan untuk menghancurkan Revolusi Islam (Labib et al., 2006: 178).

Dalam konteks nuklir, Ahmadinejad menyatakan bahwa teknologi nuklir yang Iran kembangkan tersebut bertujuan untuk perdamaian dan energi, yaitu sebagai pemasok kekuatan listrik di Iran, bukan digunakan untuk kepentingan militer seperti yang dituduhkan oleh Amerika Serikat. Di tengah tekanan Barat, Ahmadinejad memperjuangkan prinsip-prinsip dan cita-cita revolusi sejalan dengan keinginan bangsa Iran. Rakyat Iran menuntut hak-haknya terkait dengan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.

Keinginan ini yang diperjuangkan oleh pemerintah Ahmadinejad hingga akhir dua tahun pertama masa jabatannya. Berdasarkan alasan-alasan inilah, sejak awal, pemerintah Ahmadinejad menolak

politik hegemoni Barat yang bertujuan menghalangi Iran menguasai teknologi nuklir untuk tujuan damai (Fahlevie, 2013: 312).

Krisis nuklir Iran berubah menjadi masalah internasional berkat tekanan dan konspirasi yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya. Hal ini membuat pemerintah Ahmadinejad tidak diberi pilihan dalam bidang politik luar negerinya pada tahun pertama.

Pemerintahnya mengkonsentrasikan kekuatannya untuk menyelesaikan masalah nuklir. Dari sini, masalah nuklir menjadi fokus utama diplomasi Iran di mana penguasaan teknologi nuklir sangat strategis bagi pengembangan dan kemajuan sebuah negara, namun kebijakan politik luar negeri Iran berhasil mengubah masalah ini menjadi simbol perjuangan rakyat Iran menentang hegemoni Barat. Krisis nuklir Iran menjadi ujian bagi rakyat dan pejabat pemerintah untuk mengukur seberapa besar mereka membela kemandirian politik luar negeri Iran (Fahlevie, 2013: 313).

Ahmadinejad memiliki sejumlah alasan rasional yang dapat dijadikan sebagai dasar mengapa Iran tetap melanjutkan program nuklirnya. *Pertama*, nuklir merupakan teknologi prestisius yang dapat membawa Iran menuju bangsa yang maju.

Konkretnya, jika Iran berhasil memanfaatkan teknologi nuklir untuk memenuhi kebutuhan listriknya, maka Iran akan dapat membangun pembangkit tenaga listrik yang jauh lebih murah dan sangat efektif. Dengan begitu, anggaran subsidi untuk konsumsi listrik nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun dapat dikurangi secara drastis.

Artinya, untuk jangka panjang, Iran akan sangat mungkin menjadi negara yang mandiri hampir di semua bidang. Dengan memiliki alternatif teknologi nuklir dan cadangan minyak yang besar, Iran akan menjadi negara kaya. Sedangkan untuk jangka pendeknya, Iran akan memperoleh devisa negara yang sangat besar seiring meningkatnya harga gas dan minyak dunia.

Kedua, teknologi nuklir dapat membantu Iran dalam melawan segala bentuk penindasan dan dominasi negara-negara Barat atas Iran. Ini jelas merupakan perisai tangguh yang dapat menangkis geliat hegemoni Barat atas Iran. Saat ini, hegemoni Barat berhadapan dengan Iran dalam masalah nuklir. Pihak Barat, seperti Amerika Serikat dan sekutunya, khawatir bila Iran mampu meraih semua tujuan yang diinginkannya di bidang pemanfaatan

damai energi nuklir, Iran akan menjadi simbol bagi kebangkitan Revolusi Islam.

Ada hal penting yang membuat pemerintah Ahmadinejad memperkuat politik luar negerinya, yaitu tekanan dan serbuan yang luas dari hegemoni Barat dan peran vital energi nuklir dalam kemajuan dan pembangunan negara. Terlebih, saat melihat keinginan kuat rakyat Iran untuk mendapatkan haknya memanfaatkan energi nuklir untuk pembangkit tenaga listriknya. Kemampuan politik luar negeri Iran untuk keluar dari tekanan Barat dalam masalah nuklir mengubah stigma sebelumnya.

Saat ini, kemampuan nuklir Iran berubah menjadi sebuah kekuatan diplomatik dalam politik luar negeri Iran dengan dunia internasional. Hal itu karena kemajuan pesat Iran di bidang ekonomi, sosial, dan budaya ditambah sekarang Iran telah menjadi salah satu kekuatan nuklir dunia. Saat ini, masalah nuklir Iran menjadi kekuatan diplomasi pemerintah Ahmadinejad (Fahlevie, 2013: 319).

Kebijakan politik Ahmadinejad mengenai masalah pengayaan energi nuklir terus membuat hubungan Amerika Serikat dengan Iran mengalami pasang surut. Amerika Serikat, yang menguasai berbagai sektor dan bank di Iran, mulai memutuskan hubungan diplomatik pada

tahun 2009. Selain itu, Amerika Serikat memblokir dana miliaran dolar Amerika Serikat yang digunakan sebagai dana pembangunan perekonomian dan infrastruktur di Iran, baik dalam sektor militer, petrokimia, maupun proyek pesawat terbang.

Berkaitan dengan tanggapan keras dari hegemoni Barat tersebut, Ahmadinejad muncul dengan kebijakan-kebijakan luar negeri yang secara terang-terangan menyatakan ketidaksepahamannya dengan sikap-sikap dan kebijakan-kebijakan Barat terhadap Iran. Sebagai negara yang sedang berkembang, Iran dianggap terlalu berani menyatakan sikap penentangannya, namun di bawah pemerintahan Ahmadinejad, Iran akhirnya mendapatkan dukungan dari banyak negara, terutama negara-negara Islam yang berada di kawasan Timur Tengah (Lebanon dan Suriah). Ahmadinejad diakui banyak pihak sebagai simbol perlawanan terhadap Barat, termasuk di kawasan Timur Tengah (Fahlevie, 2013: 322).

Sanksi terhadap isu nuklir yang dialami Ahmadinejad memaksa Iran untuk melakukan kebijakan yang bertentangan dengan isu yang dibuat oleh sistem internasional. Kebijakan tersebut antara lain penolakan hegemonisme, kemandirian, nasional-

isme, penolakan terhadap “musuh”, dan *Islamic solidarity* (Rachmadiani, 2012: 5).ⁱⁱⁱ

Usaha Amerika Serikat dalam menghentikan program nuklir Iran menjadi alasan bagi pemerintah Ahmadinejad untuk menjadikan Amerika Serikat secara khusus sebagai musuh bersama bangsa Iran. Hal tersebut karena usaha penghentian program nuklir Iran dianggap melanggar hak bangsa Iran.

Selain itu, Ahmadinejad merasa Amerika Serikat dan Barat telah melakukan diskriminasi dengan melarang Iran mengembangkan teknologi nuklir, sedangkan Amerika Serikat dan bangsa Barat lainnya juga memiliki teknologi nuklir (Fauzi, 2013).

Dari uraian di atas, peneliti melihat identitas politik Iran pada masa Presiden Ahmadinejad, khususnya hubungan dengan Amerika Serikat dalam konteks nuklir, sangat dipengaruhi oleh konstruksi identitas Ahmadinejad yang menganggap Amerika Serikat bagian “lain” dari identitas Iran.

Oleh karena itu, sikap politik selalu berseberangan dan cenderung konfrontatif sangat diperlihatkan oleh Ahmadinejad. Hal ini dikarenakan dimensi Islamis telah ditambahkan dalam pemikiran Ahmadinejad untuk “mangkat derajat bangsa” dengan

seruan atas nama Islam. Tindakan Ahmadinejad menumbuhkan keyakinan bahwa Iran selalu menjadi asal dari segala yang baik dan semua perbuatan baik. Iran juga menganggap dirinya sebagai negara pelopor pelindung rakyat yang tertindas oleh kejahatan dan hirarki tatanan dunia yang didominasi oleh Amerika Serikat.

Hubungan Luar Negeri Iran-Amerika Serikat dalam Bidang Nuklir Era Rouhani

Setelah selesai menjabat, Ahmadinejad digantikan oleh Hassan Rouhani pada tahun 2013. Rouhani adalah seorang ulama Iran yang lahir di Sorkheh, Propinsi Semnan, pada tanggal 12 November 1948 dan tumbuh dalam keluarga yang agamis. Sebelum menjadi Presiden Iran, Rouhani pernah meniti karir sebagai seorang pengacara, akademisi, dan diplomat.

Pada tanggal 7 Mei 2013, Rouhani mencalonkan diri menjadi presiden pada pemilihan presiden Iran 2013. Jika terpilih sebagai presiden, Rouhani berjanji akan mempersiapkan suatu piagam yang dalam istilah dia adalah “piagam hak-hak sipil” serta akan memulihkan perekonomian dan meningkatkan hubungan diplomatik Iran dengan negara-negara Barat (Rouhani, 2008).

Hubungan luar negeri Iran dengan Amerika Serikat pada era Rouhani berbeda dengan era Ahmadinejad. Pada era Ahmadinejad, hubungan Iran dengan Amerika Serikat (pada masa Barack Obama) kurang berjalan dengan baik dalam kerja sama ekonomi maupun politik. Iran menganggap bahwa Presiden Obama banyak melakukan hal-hal yang kontroversial, salah satunya melakukan intervensi dan bahkan invasi terhadap negara-negara di Timur Tengah (Rachmadiani, 2012: 1).

Dengan kebijakan yang cenderung radikal, Iran mendapat banyak sanksi atau kecaman dari dunia luar sehingga masyarakat meminta agar masalah-masalah seperti sanksi ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan hak asasi manusia (HAM) lebih diperhatikan. Inilah yang menjadi fokus Presiden Rouhani (Rizky, 2013: 8).

Dunia internasional mulai memprediksi bagaimana pengaruh kepemimpinan Rouhani yang memiliki latar belakang pendidikan Barat yang kuat, berbeda dengan Ahmadinejad yang memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil di Teheran dan berhaluan konservatif garis keras yang menolak perpolitikan Barat.

Aspek yang paling menjadi sorotan adalah bagaimana nuklir menjadi

penentu masa depan Iran dalam hubungan diplomatiknya dengan Barat yang memiliki *track record* buruk dengan dijatuhkannya sanksi-sanksi ekonomi. Dalam era barunya, Rouhani mencoba mengembalikan kepercayaan Amerika Serikat, khususnya sebagai negara yang menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran atas pengayaan dan perkembangan teknologi nuklir yang diduga akan digunakan sebagai senjata militer lewat cara-cara diplomatik yang elegan (Kurnia).

Terpilihnya Rouhani pada Juni 2013 merupakan titik balik kemenangan kelompok moderat dan kaum reformis Iran. Mandat Rouhani adalah memperbaiki kondisi ekonomi dalam negerinya. Rouhani mengajak kembali beberapa profesional untuk memegang jabatan di kementerian-kementerian penting.

Rouhani sebelumnya juga berpengalaman sebagai kepala negosiator nuklir yang pernah mencapai kesepakatan penundaan pengayaan uranium dengan Barat, namun kesepakatan itu berantakan saat Ahmadinejad menjadi presiden selama dua periode. Kini saat Rouhani memimpin, waktunya untuk membuka kembali negosiasi nuklir dan pencabutan sanksi bagi perbaikan ekonomi. Pada saat yang sama, Pemimpin Tertinggi

Ayatollah Ali Khamenei mendukung langkahnya (Setiawan). Sebagaimana janji-janji yang disampaikannya pada pemilihan umum, yakni memperbaiki kondisi perekonomian Iran yang memburuk, menghormati HAM, membebaskan para tahanan politik, dan mengganti kebijakan luar negeri konfrontatif Ahmadinejad (Milani, 2013).

Beberapa hari setelah memenangkan pemilihan umum, Rouhani muncul ke hadapan wartawan untuk menjelaskan garis politiknya. Perhatian media sangat besar. Semua menunggu pernyataan Rouhani tentang politik baru yang akan ia jalankan. Pesan utamanya bahwa Iran memasuki babak baru yang moderat.

Rouhani menginginkan lebih banyak transparansi dalam program nuklir Iran untuk membangkitkan kepercayaan dunia. Pada saat yang sama, Rouhani mengkritik sanksi internasional terhadap negaranya dan menegaskan program nuklir yang dilaksanakan Iran adalah hal yang legal. Menurutnya, sengketa atom Iran hanya ada penyelesaian diplomatik. Ancaman dan sanksi bukan solusi dalam masalah ini.

Rouhani berbicara secara langsung tentang hubungan dengan Amerika Serikat dengan menyebut hubungan antara Teheran dan

Washington sebagai sebuah “luka lama yang terbuka”. Sekarang yang penting adalah menatap ke depan dan meredakan ketegangan “berdasarkan niat baik dan rasa saling menghormati”.

Rohani menandakan, setelah sengketa diplomatik selama puluhan tahun, merintis hubungan merupakan masalah yang kompleks dan perlu waktu panjang. Jika Amerika Serikat menghormati hak-hak Iran, maka pembicaraan langsung antara kedua negara mungkin dilakukan (Felden, 2013). Optimisme akan perubahan arah kebijakan nuklir Iran di bawah pemerintahan Rouhani ditandai dengan “*historic phone call*” antara Obama dengan Rouhani pada 27 September 2013.

Kontak langsung ini adalah kontak yang berlangsung untuk pertama kalinya antara Presiden Amerika Serikat dan Iran sejak Revolusi Islam tahun 1979. Perbincangan ini terkait dengan prospek penyelesaian masalah nuklir dan sanksi embargo terhadap Iran (Roberts dan Borger, 2013).

Optimisme ini akhirnya terbukti melalui tercapainya kesepakatan berbentuk *Joint Plan of Action* (JPA) sebagai persetujuan tahap awal. JPA ini disetujui pada 24 November 2013 dan menandai era baru penyelesaian sengketa nuklir Iran. Sebagian besar berpendapat

bahwa kesepakatan ini adalah kemajuan yang sangat signifikan selama hampir sepuluh dekade krisis karena telah berhasil membangun komunikasi yang positif antara Iran dan Barat, membatasi program nuklir Iran, serta pengurangan embargo dan penghapusan pembekuan aset bagi Iran (The Gulf Intelligence, 2015: 13).

Dua tahun setelah kesepakatan JPA disetujui, akhirnya pada 14 Juli 2015 disepakati kesepakatan komprehensif antara anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman tentang nuklir Iran. Upaya Barat untuk menghambat proliferasi nuklir di dunia, khususnya kawasan Timur Tengah, telah berhasil dengan dicapainya kesepakatan ini dengan Rouhani sebagai tokoh sentral Iran. Kesepakatan ini sekaligus mengakhiri panasnya hubungan Iran-Barat dalam masalah nuklir.

Dampak dari kesepakatan ini juga pada akhirnya mengakhiri masa isolasi Iran dari hubungan internasional dan era baru untuk mengembangkan kembali ekonomi Iran yang selama ini memiliki tren negatif akibat sanksi internasional. Keberhasilan Rouhani dalam normalisasi hubungannya dengan Barat telah berdampak positif terhadap kondisi di Iran. Meskipun terdapat pro dan kontra di dalam negeri, Rouhani berhasil mengupayakan pengurangan

sanksi internasional terhadap Iran (Borger, 2015).

Menurut Ali Rahigh-Aghsan dan Peter Viggo Jakobsen (2010: 559-573), secara garis besar, ada dua alasan mengapa Iran sangat berambisi mengembangkan program nuklirnya. *Pertama*, dengan ideologi yang dimilikinya (Syi'ah), Iran ingin melebarkan sayapnya di kawasan Timur Tengah dan menjadi pemimpin bagi seluruh umat Islam di dunia. *Kedua*, rasa tidak aman (*sense of insecurity*) yang dimiliki Iran terhadap keberadaan pasukan Amerika Serikat di sepanjang Jazirah Arab. Rasa tidak aman ini tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan akumulasi dari trauma mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi, seperti Perang Irak-Iran di tahun 1980-an, sikap Amerika Serikat pasca 9/11, dan invasi Amerika Serikat di Irak pada 2003.

Dari perspektif konstruktivis, kebangkitan Iran dapat dipandang sebagai kebangkitan identitas melalui model ideologi Islam Syi'ah yang dapat mendominasi dan mengancam keberadaan rezim Sunni di Bahrain, Arab Saudi, Yordania, dan Suriah mengingat baru-baru ini muncul rezim Syi'ah pula di Irak pasca runtuhnya rezim Saddam Hussein serta bentrok kekerasan antara Sunni-Syi'ah di Irak dan Lebanon. Oleh karena itu,

kebangkitan Iran, baik program nuklirnya maupun ideologi Syi'ahnya, secara garis besar telah menambah daftar pemicu ketidakstabilan dan perang saudara di kawasan Timur Tengah.

Ternyata pada praktiknya, kebangkitan Iran ini tidak hanya membawa ancaman terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga mempengaruhi Amerika Serikat dan sekutu abadinya, yakni Israel. Amerika Serikat khawatir jika program nuklir Iran akan memicu munculnya *nuclear domino effect* dan memicu *arms race*. Sangat masuk akal jika Iran memiliki senjata nuklir, maka Arab Saudi sebagai pesaingnya di kawasan Timur Tengah tentu akan merasa tertantang untuk memilikinya juga. Pada akhirnya, keberadaan Amerika Serikat di Timur Tengah tidak lagi diperlukan, bahkan dapat mengancam eksistensinya sendiri jika semua dunia Arab bersatu dan memusuhi Amerika Serikat. Belum lagi dengan adanya senjata nuklir di Iran, maka banyak kepentingan Amerika Serikat akan semakin terhambat, seperti misi pemberantasan teroris dan minyak karena adanya kekuatan besar di Timur Tengah. Kemudian ada lagi ketakutan Amerika Serikat bahwa senjata nuklir Iran tersebut akan jatuh ke tangan teroris atau digunakan untuk menyerang Israel.

Israel memang sudah seharusnya khawatir terhadap program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Mengingat data terbaru yang mengatakan bahwa Iran berhasil menguji coba nuklir yang bernama Sajjil dengan jangkauan 2.000 kilometer di tahun 2015, yang mampu menjangkau Israel ataupun aliansi terdekat Amerika Serikat (Rahigh-Aghsan dan Jakobsen, 2010: 562).

Kebijakan Amerika Serikat terhadap Program Nuklir Iran

Identitas “kolonialisme” telah lama melekat dalam diri Amerika Serikat. Menurut Edward W. Said (2003: 3), Barat (dalam hal ini Amerika Serikat) atau negeri Barat mengakui romantisme dan kesamaan citra diri Asia dan Timur Tengah merupakan pembenaran untuk melakukan ambisi imperialisme mereka. Lebih lanjut, “orientalisme” adalah gaya Barat yang menganggap diri mereka mempunyai kuasa untuk lebih mendominasi dan merestrukturisasi orang-orang Timur (Said, 2003: 3).

Pada masa awal pemerintahannya, Obama menyatakan akan memberi waktu hingga awal tahun 2010 agar Iran mengubah kebijakannya terhadap pengembangan senjata nuklir, tetapi pada pertengahan tahun 2010 Iran melanjutkan pengembangan senjata nuklirnya. Namun, Obama tetap

mengutamakan diplomasi terhadap masalah ini.

Beberapa merekomendasikan kebijakan agar Amerika Serikat harus membuka dialog dan negosiasi dengan Iran. Dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat dan P5+1 yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada awalnya Iran menemui titik kritis karena tidak adanya kesepakatan. Pertemuan yang semula dijadwalkan hanya dua hari menjadi tiga hari, tetapi dari pertemuan tersebut diperoleh beberapa titik terang terhadap masalah nuklir Iran (Toukan dan Coresman, 2010: 12).^{iv}

Dengan demikian, apa pengaruh revivalisme Islam dalam bidang nuklir Iran bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat? Mengapa Amerika Serikat selalu berupaya meredam identitas Islam Iran melalui program nuklir? Pertanyaan tersebut merupakan hal penting untuk diketahui, mengingat respon Amerika Serikat terhadap nuklir Iran begitu besar.

Iran dianggap sekutu pada masa rezim Pahlevi dan sikap tersebut berjalan harmonis sebelum revolusi yang memberikan keleluasaan membangun dan mengembangkan teknologi nuklir, namun semua itu berubah ketika Amerika Serikat menganggap Iran sebagai musuh terutama pasca Revolusi Islam Iran pada 1979. Teknologi dan pengembangan nuklir Iran serta semakin

kuatnya identitas Islam di Iran dianggap berbahaya bagi dominasi bagi Amerika Serikat (Watson Institute for International Studies, Brown University, tanpa tahun: 1).

Ada beberapa alasan penting mengapa Amerika Serikat begitu merespon perkembangan program nuklir Iran. *Pertama*, Amerika Serikat memberikan label Iran sebagai negara pendukung terorisme yang telah dianggap mendukung kelompok Islam radikal, seperti Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Pada saat itu, Presiden Obama sangat mengutuk keras sikap Iran karena komitmen Amerika Serikat untuk “memberantas terorisme” sehingga Amerika Serikat merasa perlu mengawasi dan bahkan menghentikan program nuklir Iran.

Kedua, dari segi ekonomi, perkembangan program nuklir Iran dikhawatirkan dapat mengganggu aliansi Amerika Serikat di kawasan tersebut. Program nuklir Iran dapat menghambat pengiriman minyak negara-negara aliansi yang berada di sekitar Iran ke Amerika Serikat yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi dan pasokan energi Amerika Serikat (Watson Institute for International Studies, Brown University, tanpa tahun: 8).

Ketiga, Obama mempunyai komitmen terhadap dunia tanpa senjata

nuklir. Obama berjanji akan mencegah agar senjata nuklir tidak akan dikembangkan kembali. *Keempat*, Obama akan mengambil tindakan tegas dalam hal pengembangan nuklir dengan cara memperkuat kerja sama NPT. Oleh karena itu, negara seperti Iran yang secara tegas melanggar perjanjian tersebut akan menghadapi sanksi keras internasional. *Kelima*, Obama percaya diplomasi yang intensif dan tekanan yang sungguh-sungguh adalah jalan terbaik untuk mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir. Diplomasi intensif juga diharapkan agar Iran mau transparan dengan program nuklirnya (Obama, 2009: 127).^v

Obama menawarkan kebijakan luar negerinya dengan memulai “awal baru” kepada setiap negara dalam masa pemerintahannya. Pernyataan itu dipertegas dengan kebijakan utama yang berdasarkan “kepentingan bersama” dan “saling menghormati” (Davis, 2011: 127). Dari komunikasi politik semacam itu, dapat dilihat bahwa kebijakan Obama memang tidak sekeras para pendahulunya yang datang dari Partai Republik, terutama terkait hubungan Amerika Serikat-Iran dalam konteks nuklir.

Tidak lama setelah memimpin, Obama mengambil langkah dramatis untuk mendekati Iran. Obama

menawarkan hubungan yang lebih konstruktif dan bertujuan merangkul serta membujuk pemimpin Iran untuk bernegosiasi mencari solusi bagi isu nuklir. Kontroversi memuncak ketika Iran mengklaim bahwa program nuklirnya adalah untuk tujuan damai, terutama untuk memproduksi listrik dan kebutuhan medis. Amerika Serikat tidak setuju dan menuduh tujuan Iran mengembangkan uranium sebagai dalih untuk menutupi pengembangan senjata nuklir. Obama memberikan waktu bagi pemerintah Iran sampai September 2009 untuk bernegosiasi. Sementara itu, Obama memperbarui sanksi untuk tahun berikutnya karena Iran dianggap masih menjadi ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Obama juga mengancam Iran dengan sanksi baru jika Iran tidak mau bernegosiasi.

Pada akhir tahun 2009, terungkap bahwa Iran secara diam-diam membangun pusat nuklir kedua di Qom yang menempatkan 3.000 *centrifuge* nuklir dan bahan pembuat senjata nuklir. Menurut Obama, hal itu adalah bentuk inkonsistensi Iran terhadap tujuan perdamaian (Davis, 2011: 144).^{vi}

Kesimpulan

Pengaruh revivalisme Islam Iran terutama dalam bidang nuklir sangat berdampak pada kepentingan dan

kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa aspek.

Pertama, permasalahan nuklir merupakan hal yang sangat vital bagi kepentingan kedua negara (Iran dan Amerika Serikat). Bagi Iran, pengembangan energi nuklir merupakan salah satu cara untuk memperoleh pengaruh di kawasan Timur Tengah serta mempromosikan identitas Islam yang dimilikinya agar negara-negara Islam mau mengikuti langkah Iran sebagai penentang dan terbebas dari dominasi Amerika Serikat.

Kesepakatan nuklir antara Iran dengan P5+1 pada tahun 2015, yang menginginkan Iran mengurangi kegiatan nuklir, tidak lain merupakan cara yang efektif bagi Iran untuk mengurangi sanksi ekonomi yang mereka hadapi. Dengan begitu, akses-akses ekonomi yang sempat tertutup kini mulai terbuka kembali. Di sisi lain, bagi Amerika Serikat, menghentikan nuklir Iran berarti mempermudah akses-akses kepentingan Amerika Serikat dengan negara-negara aliansi Amerika Serikat dan meredam penggunaan nuklir di Timur Tengah secara masif.

Kedua, postur antagonis Iran terhadap Amerika Serikat merupakan buah dari prinsip anti-dominasi, anti-hegemoni, dan anti-penjajahan yang

tersurat jelas dalam Konstitusi Iran yang mulai diterapkan pasca Revolusi. Jadi, identitas Islam Iran juga merupakan komponen penting dalam setiap interaksi maupun doktrin luar negeri Iran dengan bangsa lain, terutama hubungannya dengan Amerika Serikat. Dinamika pergantian pemimpin Iran tidak akan mengubah identitas politik, terutama politik luar negeri, yang telah terbentuk pasca Revolusi sebagai landasan utama doktrin kebijakan luar negeri Iran.

Ketiga, tujuan politik lunak Amerika Serikat yang Obama maksud adalah untuk mempengaruhi Iran agar lebih terbuka dan jujur dalam persoalan nuklirnya. Akan tetapi, politik lunak Obama pada kenyataannya tidak berbeda jauh dengan sikap pemimpin-pemimpin Amerika Serikat sebelum Obama yang cenderung konfrontatif terhadap Iran. Hal ini dapat terlihat pada sanksi-sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran pada masa pemerintahan Obama.

Keempat, dinamika hubungan yang selalu memanas antara Iran dengan Amerika Serikat tidak akan mereda. Iran tidak mengubah sikap dan pandangannya terhadap Amerika Serikat yang selalu diwarnai stereotip dan permusuhan, begitupun sebaliknya. Jadi, sikap Iran terhadap Amerika Serikat harus berubah, begitupun sebaliknya, sehingga

terciptalah hubungan yang saling menghormati (*mutual respect*) dan saling menguntungkan (*mutual interest*).

Kelima, dalam konteks nuklir, Iran telah membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu negara dengan perkembangan teknologi nuklir tercepat di dunia yang wajib diperhitungkan. Hal ini dibuktikan dengan tidak berhentinya perkembangan nuklir Iran walaupun banyak diprotes oleh masyarakat internasional dan adanya sanksi terhadap Iran.

Namun, jika melihat perhitungan kasar, kurang rasional bila Iran menyerang Amerika Serikat dan aliansinya dengan bom nuklir. Hal ini sama saja dengan bunuh diri karena Amerika Serikat merupakan salah satu pemilik bom nuklir terbesar. Sekali perintah dikeluarkan oleh Amerika Serikat untuk menyerang Iran dengan nuklir, Iran bisa “menghilang” dari peta dunia.

Daftar Pustaka

Buku

Abdilah, Ubed. *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Penerbit Yayasan Indonesiatara, 2002.

Ajromand, Said Amir. *After Khomeini: Iran under His Successors*. New

- York: Oxford University Press, 2009.
- Akbarzadeh, Shahram (ed.). *America's Challenges in the Greater Middle East: The Obama Administration's Policies*. New York: Palgrave Macmillan, 2011.
- Alexander, Yonah dan Milton Hoenig. *The New Iranian Leadership: Ahmadinejad, Terrorism, Nuclear Ambition, and the Middle East*. Connecticut: Praeger Security International, 2008.
- Ayubi, Nazih N. *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*. New York: Routledge, 1991.
- Beeman, William O. *The "Great Satan" vs. the "Mad Mullahs": How the United States and Iran Demonize Each Other*. Connecticut: Greenwood Publishing Group, Inc., 2005.
- Bernstein, Jeremy. *Nuclear Iran*. Massachusetts: Harvard University Press, 2014.
- Burdah, Ibnu. *Islam Kontemporer, Revolusi dan Demokrasi: Sejarah Politik Dunia Islam dan Gerakan Arab dalam Arus Demokrasi Global*. Malang: Intrans Publishing, 2013.
- Choueiri, Youssef M. *Islamic Fundamentalism: The Story of Islamist Movement*. Third Edition. New York: Continuum International Publishing Group, 2010.
- Christie, Kenneth (ed.). *United States Foreign Policy and National Identity in the 21st Century*. New York: Taylor & Francis Group, 2008.
- Cirincione, Joseph, Jon Wolfsthal, dan Miriam Rajkumar. *Iran, in Deadly Arsenals: Nuclear, Biological, and Chemical Threats*. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2005.
- Coplin, William D. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: CV Sinar Baru, 1992.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Dault, Adhyaksa. *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal dalam Konteks Nasional*. Jakarta: Yayasan Amanah Daulatul Islam, 2003.
- Davaran, Fereshteh. *Continuity in Iranian Identity Resilience of a*

- Cultural Heritage*. New York: Taylor & Francis Group, 2010.
- Davis, John (ed.). *The Barack Obama Presidency: A Two Years Assessment*. New York: Palgrave Macmillan, 2011.
- Dekmejian, Richard Hrair. *Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World*. New York: Syracuse University Press, 1995.
- Esposito, John L. dan John O. Voll. *Makers of Contemporary Islam*. New York: Oxford University Press, 2001.
- Esposito, John L. *The Future of Islam*. New York: Oxford University Press, 2010.
- Esposito, John L. *The Oxford History of Islam*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Esposito, John L. *Unholy War: Terror in the Name of Islam*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Esposito, John L. *Voices of Resurgent Islam*. New York: Oxford University Press, 1983.
- Fayazmanesh, Sasan. *The United States and Iran: Sanctions, Wars and the Policy of Dual Containment*. New York: Routledge, 2008.
- Fazeli, Nematullah. *Politics of Culture in Iran*. New York: Routledge, 2006.
- Fuller, Graham E. *Apa Jadinya Dunia Tanpa Islam? Sebuah Narasi Sejarah Alternatif*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014.
- Fuller, Graham E. *The Future of Political Islam*. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- Gergez, Fawas A. *Amerika dan Islam Politik: Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan?*. Jakarta: Alvabet, 1999.
- Hatzopoulos, Pavlos dan Fabio Petito (ed.). *Religion in International Relations: The Return from Exile*. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- Hunter, Shireen (ed.). *Reformist Voices of Islam: Mediating Islam and Modernity*. New York: M. E. Sharpe, 2008.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Ja'far, Suhermanto et al. *Pemikiran Modern dalam Islam*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Jackson, Robert dan Georg Sørensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Khan, Shaira. *Iran and Nuclear Weapons: Protracted Conflict*

- and Proliferation*. New York: Routledge, 2010.
- Labib, Muhsin et al. *Ahmadinejad: David di Tengah Ankara Goliath Dunia*. Jakarta: Hikmah, 2006.
- Lewis, Bernard et al. *The Encyclopedia of Islam*. New Edition. Massachusetts: E. J. Brill, 1997.
- Mærli, Morten Bremer dan Sverre Lodgaard (ed.). *Nuclear Proliferation and International Security*. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
- Martin, Richard C. (ed.). *Encyclopedia of Islam and Muslim World*. New York: The Gale Group, Inc., 2004.
- Mas' oed, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1990.
- Mohseni, Payam. *Iran and the Arab World after the Nuclear Deal: Rivalry and Engagement in a New Era*. Massachusetts: Harvard Kennedy School, 2015.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Obama, Barack. *Change We Can Believe In: Barack Obama's Plan to Renew America's Promise*. Washington: Pacific Publishing Studio, 2009.
- Panah, Maryam. *The Islamic Republic and the World: Global Dimensions of the Iranian Revolution*. London: Pluto Press, 2007.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Rafferty, Richard W. dan Kirsten L. Mansbach. *Pengantar Politik Global*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012.
- Rahmat, M. Imdadun. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Romli, Asep Syamsul. *Demonologi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rouhani, Hassan. *Memoirs of Hassan Rouhani. Vol. 1: The Islamic Revolution (in Persian)*. Teheran: Center for Strategic Research, 2008.
- Rudy, Teuku May. *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: Angkasa, 1993.

- Said, Edward W. *Orientalism*. Fifth Edition. London: Penguin Book, Ltd., 2003.
- Samore, Gary (ed.). *The Iran Nuclear Deal: A Definitive Guide*. Massachusetts: Harvard Kennedy School, 2015.
- Sanger, David E. *Confront and Conceal: Obama Secret Wars and Surprising Use of American Power*. New York: Random House, Inc., 2012.
- Sihbudi, Riza. *Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel terhadap Negara-negara Muslim*. Bandung: PT Mizan Publika, 2007.
- Thomas, Scott M. *Culture and Religion in International Relations*. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Tibi, Bassam. *Islam between Culture and Politics*. New York: Palgrave Macmillan, 2001.
- Wardoyo, Broto. *Perkembangan, Paradigma dan Konsep Keamanan Internasional dan Relevansinya untuk Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Nugra Media, 2015.
- Wendt, Alexander. *Social Theory of International Politics*. New York: Cambridge University Press, 1999.
- Zahedi, Dariush. *The Iranian Revolution Then and Now: Indicators of Regime Instability*. Colorado: Westview Press, 2000.
- Zaki, Mohammed M. *American Global Challenges: The Obama Era*. New York: Palgrave Macmillan, 2011.
- Jurnal**
- Akbar, Hikmatul dan Pinilih Kodimerinda. “Pengembangan Nuklir Iran dan Diplomasi Kepada IAEA”. (2011), hal. 1-17.
- Al Walid, Kholid. “Wilayat Al-Faqih Sebagai Konsep Pemerintahan Teo-Demokrasi”. *Jurnal Review Politik*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2013), hal. 140-153.
- Andriasanti, Lelly. “Identitas Islam Moderat dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia”. *Global*, Vol. 16, No. 1 (Desember 2013-Mei 2014), hal. 84-101.
- Fahlevie, Robiat. “Peranan Mahmoud Ahmadinejad dalam Mengembangkan Iran Menjadi Kekuatan Besar di Kawasan Timur Tengah”. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 2 (2013), hal. 311-324.
- Fauzi, Moch. Zulfikar. “Strategi Pemerintahan Ahmadinejad

- dalam Penolakan Penghentian Program Nuklir Iran yang Berdampak terhadap Semakin Memburuknya Hubungan Iran dengan Amerika Serikat Tahun 2005–2009”. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2013), hal. 203-216.
- Mikail, Kiki. “Iran di Tengah Hegemoni Barat (Studi Politik Luar Negeri Iran Pasca Revolusi 1979)”. *Jurnal Tamaddun*, Vol. 13, No. 2 (2013), hal. 1-23.
- Pujayanti, Adirini. “Sanksi Ekonomi terhadap Iran dan Dampak Internasionalnya”. *Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol. IV, No. 04/II/P3DI (2012), hal. 1.
- Rachmadiani, Ananda. “Kebijakan Luar Negeri Iran terhadap Amerika Serikat Mengenai Isu Nuklir pada Masa Hasan Rouhani”. *Jurnal Universitas Jember*, Vol. 1, No. 1 (2012), hal. 1-15.
- Rahigh-Aghsan, Ali dan Peter Viggo Jakobsen. “The Rise of Iran: How Durable, How Dangerous?”. *The Middle East Journal*, Vol. 64, No. 4 (2010), hal. 359-573.
- Sadeghi, Ahmad. “Genealogy of Iranian Foreign Policy: Identity, Culture, and History”. *The Iranian Journal of International Affairs*, Vol. 20, No. 4 (2008), hal. 10.
- Sheri, Berman. “Islamism, Revolution, and Civil Society”. *Perspectives on Politics*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2003), hal. 257-272.
- Wendt, Alexander. “Collective Identity Formation and the International State”. *The American Political Science Review*, Vol. 88, No. 2 (Juni 1994), hal. 384-396.
- Wibowo, Prihandono. “Fenomena Neorevivalisme Islam dalam Dunia Internasional”. (t.thn.), hal. 169-188.
- Zuhdi, M. Nurdin. “Kritik terhadap Pemikiran Gerakan Keagamaan Kaum Revivalisme Islam di Indonesia”. *Akademika*, Vol. 16, No. 2 (Januari-Juni 2011), hal. 172.

Dokumen Lain

- Burr, William. “A Brief History of U.S.-Iranian Nuclear Negotiations”. *Bulletin of the Atomic Scientists* (Januari-Februari 2009), hal. 21.
- Dawson, Julian. *A Constructivist Approach to the US-Iranian Nuclear Problem*. Tesis University of Calgary (2011).
- Mary, Annabel Christina. *A Clash of Civilisations? Culture and Ideology in US-Iran Relations*

- Since 1979. Tesis Durham University (2002).
- Mullin, Corinna. *Political Islam and the United States' New "Other": An Analysis of the Discourse on Political Islam (2001-2007)*. Tesis The London School of Economics and Political Science (2008).
- Rizky, Resty Meiva. *Perubahan Kebijakan Nuklir Iran di Era Pemerintahan Hassan Rouhani*. Paper Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (2013).
- Smith, Rachel L. *Iran: A Study in International Relations Theory and Practice*. Tesis Johns Hopkins University (2014).
- The Gulf Intelligence. "Iran: Interim Nuclear Agreement and Talks on a Comprehensive Accord". *A Gulf Intelligence Special Report* (2015), hal. 13.
- Toukan, Abdullah dan Anthony H. Coresman. "Options in Dealing with Iran's Nuclear Program". *Center for Strategic and International Studies Report* (2010).
- Watson Institute for International Studies, Brown University. "The United States and the Iranian Nuclear Program: Policy Options". *Watson Institute for International Studies, Brown University* (t.thn.).
- Wibisono, Ragil. *Respon Amerika terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir Iran 2005-2010*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2011).
- Internet**
- Artileri. "Fakta Nuklir Iran: untuk Senjata atau untuk Damai". *Artileri*, 2012. <http://www.artileri.org/2012/09/fakta-nuklir-iran-untuk-senjata-atau-damai.html> (diakses pada tanggal 8 Juni 2016 pukul 22.23 WIB).
- Borger, Julian. "Middle East: Iran nuclear deal: world powers reach historic agreement to lift sanctions". *The Guardian*, 2015. <https://www.theguardian.com/world/2015/jul/14/iran-nuclear-programme-world-powers-historic-deal-lift-sanctions> (diakses pada tanggal 20 Juni 2016 pukul 02.51 WIB).
- CNN Indonesia. "Ahmadinejad Kembali ke Politik Iran Ancaman bagi Amerika". *CNN Indonesia*, 2015. <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150804124603-134->

- [69959/ahmadinejad-kembali-ke-politik-iran-ancaman-bagi-as/](http://www.dw.de/iran-bertekad-hasilkan-kesepakatan-nuklir/a-17241494) (diakses pada tanggal 11 Januari 2016 17.28 WIB).
- Deutsche Welle. "Iran Bertekad Hasilkan Kesepakatan Nuklir". *Deutsche Welle*, 2013. <http://www.dw.de/iran-bertekad-hasilkan-kesepakatan-nuklir/a-17241494> diakses pada tanggal 11 Juni 2016 pukul 12.36 WIB).
- Felden, Esther. "Haluan Politik Presiden Terpilih Iran Hassan Rouhani". *Deutsche Welle*, 2013. <http://www.dw.com/id/haluan-politik-presiden-terpilih-iran-hassan-rouhani/a-16894342> (diakses pada tanggal 20 Juni 2016 pukul 01.32 WIB).
- Iran Chambers Society. "The Constitution of Islamic Republic of Iran". *Iran Chambers Society*, t.thn. http://www.iranchamber.com/government/laws/constitution_ch10.php (diakses pada tanggal 11 Juni 2016 pukul 19.22 WIB).
- Iran Indonesian Radio. "Iran, Teladan Perjuangan Melawan Kekuatan Imperialis". *Iran Indonesian Radio*, 2015. <http://indonesian.irib.ir/ranah/teliksik/item/91455-iran,-teladan-perjuangan-melawan-kekuatan-imperialis-4> (diakses pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 10.53 WIB).
- Kurnia, Anggika. "Era Diplomasi Baru Iran : Rouhani dan Nuclear Cooperative Security". *Academia*, t.thn. http://www.academia.edu/8338897/Era_Diplomasi_Baru_Iran_Rouhani_dan_Nuclear_Cooperative_Security (diakses pada tanggal 18 Juni 2016 pukul 15.17 WIB).
- Laksana, A.S. "Obama dan Watak Dasar Politik Luar Negeri Amerika". *The Global Review*, 2009. http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=170&type=4#.VtkKP9CeDDc (diakses pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 11.11 WIB).
- Milani, Mohsen. "Rouhani's Foreign Policy: How to Work With Iran's Pragmatic New President". *Foreign Affairs*, 2013. <http://www.foreignaffairs.com/articles/139531/mohsen-milani/rouhanis-foreign-policy> (diakses pada tanggal 19 Juni 2016 pukul 13.45 WIB).
- Murphy, Richard W. "Hubungan AS-Iran baik hubungan AS-Timur Tengah pun akan baik". *Common Ground News*, 2009. <http://www.commongroundnews.com>

- [org/article.php?id=24624&lan=b&sp=0](http://www.foreignaffairs.com/article.php?id=24624&lan=b&sp=0) (diakses pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 15.15 WIB).
- Nau, Henry R. "At Home Abroad: Identity and Power in American Foreign Policy". *Foreign Affairs*, 2004.
<https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2004-01-01/home-abroad-identity-and-power-american-foreign-policy> (diakses pada tanggal 7 Juli 2016 pukul 22.52 WIB).
- Nuclear Threat Initiative. "Iran Nuclear Cronology". *Nuclear Threat Initiative*, t.thn.
http://www.nti.org/media/pdfs/iran_nuclear.pdf?_id=1316542527 (diakses pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 11.20 WIB).
- Porter, Keith. "Timeline of U.S.-Iranian Relations 1953 to Present". *US Foreign Policy*, t.thn.
<http://usforeignpolicy.about.com/od/middleeast/a/timelineusiran.htm> (diakses pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 09.18 WIB).
- Raharjo, Shandy Nur Ikhfal. "Mengamati Pola Hubungan Iran-AS". *Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 2012.
<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/timur-tengah/716-mengamati-pola-hubungan-iran-as> (diakses pada tanggal 20 Mei 2016 pukul 10.00 WIB).
- Roberts, Dan dan Julian Borger. "Obama Hold Historic Phone Call with Rouhani and Hints at the End of Sanction". *The Guardian*, 2013.
<http://www.theguardian.com/world/2013/sep/27/obama-phone-call-iranian-president-rouhani/> (diakses pada tanggal 20 Juni 2016 pukul 02.26 WIB).
- Sahimi, Mohammad. "Iran's Nuclear Program. Part I: Its History". *Payvand*, 2003.
<http://www.payvand.com/news/03/oct/1015.html> (diakses pada tanggal 19 Mei 2016 pukul 23.04 WIB).
- Setiawan, Dadang. "Kesepakatan Nuklir Iran: Anatomi dan Agenda". *Academia*, t.thn.
http://www.academia.edu/5357147/Kesepakatan_Nuklir_Iran_Anatomi_dan_Agenda (diakses pada tanggal 18 Juni 2016 pukul 15.20 WIB).
- White House. "Fact Sheet on Additional Iran Sanctions". *White House*, t.thn.
<http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2012/07/2012073142626.html#axzz31aYadNg>

(diakses pada tanggal 24 Juni
2016 pukul 10.56 WIB).

ⁱ Ketika mengkaji politik Iran, kita tidak bisa melepaskannya dari ideologi Syi'ah yang menjadi ideologi negara tersebut. Ketika Iran melakukan aktivitas internasional di dunia Islam dan mendukung gerakan-gerakan Islam (perlawanan), hal ini akan menjadi kekuatan bagi Iran. Dengan kondisi seperti ini, Iran bukan hanya sebatas sebuah negara, melainkan juga telah menjadi kekuatan internasional dengan menjadikan Islam sebagai jargon untuk memperkuat posisinya sebagai "pemimpin dunia Islam Syi'ah", yang pada akhirnya dengan artikulasi identitas tersebut berarti Iran menjalankan politik luar negeri yang menempatkan Islam sebagai komponen penting dalam perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan luar negerinya.

ⁱⁱ Sistem *Wilayat Al Faqih* (supremasi kaum ulama) di mana seorang pemimpin agama memiliki hak untuk memberikan fatwa keagamaan dan sekaligus memegang kekuasaan tertinggi dalam masalah ketatanegaraan. Menurut peneliti, konsep *Wilayat Al Faqih* merupakan sebuah penegasan identitas asli Iran yang memegang teguh ajaran Islam Syi'ah. Seperti yang telah diuraikan di atas, konsep ini sangat bergantung terhadap keputusan pemimpin agung (*supreme leader*). Walaupun secara konstitusional sistem pemerintahan Iran masih dipegang oleh presiden, bangsa Iran percaya bahwa setiap sendi kehidupan tidak terlepas dari peran Allah, termasuk urusan ketatanegaraan di mana imam/pemimpin dipercaya sebagai wakil Allah dalam menjalankan pemerintahan. Secara eksplisit, garis-garis pemerintahan Islam "versi Syi'ah" dapat dilihat dalam buku Ali Khomeini yang berjudul "Pemikiran Politik Islam dalam Pemerintahan (*Al-Hukmah Al-Islamiyyah*)".

ⁱⁱⁱ Pada tahun 2012, sanksi ekonomi yang lebih keras dijatuhkan pada Iran dengan melarang negara-negara lain mengimpor minyak dari Iran. Hal ini menyebabkan anjloknya angka ekspor Iran dari 2,5 juta barrel menjadi 1,4 barrel per hari.

^{iv} Dalam perundingan ini, Iran menyetujui inspeksi internasional terhadap fasilitas nuklirnya dalam jangka waktu dua minggu. Iran juga menyetujui pengayaan uranium berkadar rendah/*low enriched uranium* (LEU) yang bertujuan mencegah Iran untuk memproduksi uranium berkadar tinggi/*high enriched uranium* (HEU) yang dikhawatirkan Amerika Serikat

dapat digunakan untuk memproduksi senjata nuklir. Kadar standar uranium yang diizinkan IAEA bisa dilihat pada laporan "Management of High Enriched Uranium for Peaceful Purposes: Status and Trends", hal. 2.

^v Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata nuklir, serta untuk mempromosikan kerja sama dalam penggunaan damai energi nuklir. Iran sendiri menandatangani protokol tersebut pada bulan Desember 2003 dan setuju untuk menandatangani ratifikasi yang sempat tertunda beberapa tahun lalu. Akan tetapi, pada tahun 2006, Iran berhenti mengikuti beberapa protokol tambahan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Informasi lebih lanjut mengenai anggota, ratifikasi dan regulasi NPT dapat diperoleh melalui laporan IAEA tahun 2013 yang berjudul "Legal Framework for IAEA Safeguards".

^{vi} Fasilitas penelitian nuklir pertama dibangun di Teheran pada tahun 1967 yang dikelola oleh *Atomic Energy Organization of Iran* (AEOI) dengan bantuan Amerika Serikat di bawah *Atom for Peace Program* yang dilengkapi dengan beberapa penelitian reaktor nuklir dan secara resmi beroperasi tahun 1967 dengan pengayaan HEU. Fasilitas ini dinamai *Tehran Nuclear Research Center* (TNRC). Namun setelah Revolusi tahun 1979, Amerika Serikat menghentikan pasokan HEU untuk fasilitas nuklir yang berada di Teheran sehingga memaksa Iran menghentikan reaktornya beberapa tahun kemudian dan mendapat pasokan HEU dari Argentina. Pada tahun 2012, Iran secara mandiri memproduksi uranium untuk pasokan di *Tehran Research Reactor* (TRR). Laporan tersebut secara lengkap dapat diperoleh dalam laporan IAEA tahun 1967 yang berjudul "Contract between the International Atomic Energy Agency, Iran and the United States of America for the transfer of Enriched Uranium and Plutonium for a Research Reactor in Iran".